

BUKU KENANGAN ANGGOTA DPR RI
PERIODE 1999 - 2004



I. DATA PRIBADI :

1. Nama Lengkap : **AHMAD FARHAN HAMID**
2. Nomor Anggota : 219/P
3. Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Utara, 21 Januari 1953
4. Agama : Islam
5. Alamat a. Daerah : -
b. Jakarta : -
6. Pendidikan Tertinggi : Pendidikan Tinggi (Strata Tiga) di Post Graduate School, Universiti Sains Malaysia Ilmu Kesehatan / Pharmacy, Penang (tamat 1994, Ph.D)
7. Fraksi : Reformasi
8. Keppres Pengangkatan : Nomor : 392/M Tahun 1999 Tgl. : 20 Desember 1999
9. Pelantikan : Tgl. 25 Januari 2000 Oleh Ketua DPR RI
10. Daerah Pemilihan : D.I. Aceh / Pidie
11. Nama Istri/Suami : Ferry Soraya
12. Jumlah Anak : 6 (enam) orang : 5 perempuan, 1 laki-laki

II. JABATAN DI DPR RI :

- a. Anggota Komisi II DPR RI, Februari - Agustus 2000*)
b. Anggota Badan Musyawarah (BAMUS) DPR RI, April 2000 - sekarang
c. Anggota Komisi V DPR RI, 04 September 2000 - sekarang
d. Komisi II DPR RI membidangi Hukum, Hak Azasi Manusia, dan Pemerintah Dalam Negeri
e. Komisi V DPR RI membidangi Industri dan Perdagangan (pernah juga Pariwisata)

III. AKTIFITAS SELAMA DI DPR RI

- Anggota Pansus RUU Amnesti dan Abolisi kepada Tapon dan Napol (Komisi II)
- Anggota PANSUS terhadap Perubahan 5 Undang-Undang bidang Perpajakan, Juni 2000
- Anggota Pansus RUU tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM), Juni 2000
- Anggota Pansus RUU PPh dan Penagihan dengan surat Paksa, Juli 2000
- Anggota Pansus RUU tentang Otonomi Khusus NAD, tahun 2000
- Anggota Pansus RUU tentang Otonomi Khusus Papua, tahun 2000
- Anggota Pansus RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 dan Perpu No. 2, Tahun 2000
- Anggota Pansus RUU tentang HAKI, tahun 2000
- Anggota Pansus RUU tentang Perubahan UU No. 45-55 tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah.
- Anggota Pansus RUU Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD I, DPRD II, tahun 2003
- Anggota Pansus RUU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tahun 2003
- Anggota Pansus Perubahan UU 22/1999, tahun 2004
- Anggota Pansus Perubahan UU 25/1999, tahun 2004
- Anggota Pansus RUU tentang Pelabuhan Bebas Batam, tahun 2004
- Anggota Pansus Perubahan 37/2000 tentang....., tahun 2004

- Mengikuti International Visitor Program Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, di 5 Negara Bagian USA, tahun 2000
- Anggota Delegasi Muhibah DPR RI ke Slovakia, Juni 2003
- Anggota Delegasi Muhibah DPR RI ke Malaysia, tahun 2004

IV. JABATAN DALAM PARTAI/FRAKSI :

- Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Istimewa Aceh, 1999-2000
- Wakil Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Istimewa Aceh, 2000-2005
- Ketua MPP DPD Partai Amanat Nasional Kota Lhokseumawe, periode 2000-2005
- Anggota DPP Partai Amanat Nasional, periode 2000-2005
- Wakil Sekretaris Fraksi Reformasi DPR RI, Januari 2000 - Agustus 2000
- Sekretaris Fraksi Reformasi DPR RI, Agustus 2000-2001
- Ketua Fraksi Reformasi DPR RI (periode 1999-2004, 2001 - sekarang)

V. PESAN DAN KESAN SELAMA MENJADI ANGGOTA DPR RI

Sebagai anggota DPR pengganti antar waktu dengan sdrku DR. Hasballah M Saad, saya menjalankan tugas tidak sampai lima tahun penuh. Awal masa tugas DPR 1999-2004 selama sekitar tiga setengah bulan saya tidak turut serta dalam pengambilan putusan di DPR, yakni dari bulan Oktober 1999 hingga akhir Januari 2000. Salah satu putusan Dewan yang bermakna pada waktu itu adalah lahirnya Rekomendasi DPR RI untuk penyelesaian kasus konflik di Provinsi Daerah Istimewa Aceh atau yang kita sekarang sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Menjadi bagian dari proses pengambilan putusan untuk memantapkan arah perjuangan bangsa merupakan kepuasan yang membahagiakan sepanjang hidup. Setelah Indonesia merdeka 54 tahun, maka pada tahun 1999 arah pemantapan itu dilakukan. Di bawah kepemimpinan Mohammad Amien Rais, MPR menetapkan perubahan UUD, yang secara berkesinambungan dalam masa tugas MPR 1999-2004 dapat menyelesaikan perubahan besar tersebut. Saya amat bahagia karena terlibat secara langsung dalam proses perubahan tersebut. Perubahan yang merupakan salah satu tuntutan reformasi bernegara setelah Indonesia berada di bawah pemerintahan Soeharto selama kurang lebih 32 tahun. Tuntutan reformasi lainnya yang menjadi perhatian utama legislatif periode ini adalah otonomi daerah, mengakhiri dwi fungsi (ABRI) TNI/Polri, dan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Baik MPR maupun DPR dalam kapasitasnya masing-masing dapat menyelesaikan tugas besar ini dengan baik, meskipun ada kekurangan yang masih perlu diperbaiki.

Dalam pembentukan UU, saya merasa amat berbahagia dapat memutuskan pembentukan UU Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Otonomi Khusus Papua, dan pembentukan UU Pendidikan Nasional, Ketiga UU ini menjadi perhatian utama dalam fungsi legislasi yang saya jalankan, mengingat ada pasal-pasal atau substansi yang memungkinkan munculnya gagasan 'reaktif' di tengah masyarakat. Syukur alhamdulillah, dapat diselesaikan dengan baik, meskipun tidak semuanya dapat berjalan dengan mulus.

Khusus mengenai Nanggroe Aceh Darussalam yang memang saya mengambil peran sebagai salah satu penggagas utama RUU usul inisiatif, merupakan wujud pertanggungjawaban moral saya sebagai wakil rakyat dari wilayah tersebut. Seringkali dalam kehidupan saya dihantui oleh 'ketakutan' akan berlarut-larutnya konflik di wilayah ini tanpa alternatif penyelesaiannya di luar cara 'kekerasan'. UU Nanggroe Aceh Darussalam yang sering saya sebut sebagai "gerbagn perubahan untuk rakyat Aceh" adalah solusi alternatif untuk mengakhiri konflik ini, sekali dan untuk selamanya. Sebelum UU ini disahkan, saya juga terlibat secara mendalam dalam pembentukan UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Sebuah usaha politik dan ekonomi yang diharapkan berkontribusi bagi penyelesaian konflik di Aceh.

Demikian pula halnya dengan Pembentukan UU Pemilu Legislatif dan UU Pemilu Presiden/Wakil Presiden secara langsung, yang merupakan tonggak sejarah pemajuan demokrasi di Indonesia. Kerja sama antara anggota DPR dan antar fraksi merupakan kenangan kerja sama politik yang dipatut dicontoh dalam perjalanan kehidupan berbangsa di masa yang akan datang. Pengalaman ini semua membuktikan kepada siapa saja baik didalam maupun di luar negeri, bahwa bangsa kita sangat siap memasuki era demokratisasi, dan sesungguhnya kita sudah banyak belajar dari kegagalan di masa lalu.

Sebagai anak desa, keseharian saya sering melankolis jika teringat akan kampung halaman yang begitu indah, makmur, dan damai. Kini suasana yang demikian tidak mudah kita temukan di Aceh, namun untuk melepas kerinduan sehari-hari, saya sangat bahagia jika sekarang dengan mudah saya bisa mendapatkan makanan Aceh

di Jakarta. Saaya makan di pinggir jalan, baik di Pasar Minggu, Pondok Gede, Jalan Kali Malang, Pondok Cabe, atau tempat lain.

Banyak anak muda dari Naggroe Aceh Darussam pergi merantau terutama ke kota besar seperti Jakarta, karena suasana yang kurang kondusif di kampung halaman. Saya yakin gerakan ke luar dari kampung akan membawa efek positif bagi masa depan mereka.

Suasana gedung DPR RI selama lima tahun terakhir memang betul-betul sebagai runah rakyat. Tiap hari banyak orang datang dengan berbagai kepentingan, umumnya mengadukan hal-hal yang dirasa musykil di daerahnya. Ini memberi kesan bahwa makna positif reformasi telah dirasakan masyarakat kita, berani menyampaikan apa yang dianggap janggal kepada wakil-wakilnya di parlemen. Tetapi disisi lain, kondisi ini juga menggambarkan ada sumbatan aspirasi yang berjenjang, yakni pemerintah daerah dan legislatif daerah belum signifikan memainkan perannya untuk menjembatani aspirasi tersebut. Sehingga masyarakat harus menyampaikan secara langsung ke DPR RI. Ke depan saya kira harus diperbaiki, sehingga peran legislatif di berbagai tingkatan (Provinsi, kabupaten, Kota) akan optimal. Bagaimana akibat dari banyaknya 'tamu' anggota DPR telah dijadikan alasan untuk mangkir dari sidang-sidang Komisi, Fraksi, ataupun Paripurna.

Terhadap kebiasaan mengjadiri Paripurna DPR yang memakan waktu berjam-jam dan menjadi sorotan media, saya patut mengharapkan perbaikan sistem di masa yang akan datang. Seharusnya kehadirann anggota di paripurna hanya untuk proses pengambilan keputusan, sebagaimana juga terjadi dinegara lain, Australia misalnya. Juru bicara fraksi dipersilakan membaca pendapat fraksinya di ruang rapat, sementara anggota dapat mengikuti melalui media TV di kamar kerjanya masing-masing sambil melakukan kerja-kerja lain. Hanya pada saat pengambilan putusan semua anggota hadir di ruang paripurna. Dengan cara ini maka tidak terjadi pembaziran waktu, yang selama ini disorot sedang membaca koran atau malah tertidur lelap di ruang rapat, sementara di podium, anggota yang bertugas terus membaca pendapat fraksinya. Suasana ini seringkali menjadi bahan cemoohan publik kepada anggota DPR RI.

